



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. tersedianya informasi Kementerian Ketenagakerjaan yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;

- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis tercantum dalam Lampiran I dan daftar arsip berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1634

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma baru terhadap akses informasi arsip dinamis yang semula tertutup untuk publik menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dengan demikian, setiap pencipta arsip diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut.

Dokumen klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akuntabilitas informasinya.

Melalui klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik di Kementerian Ketenagakerjaan dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

B. Ruang Lingkup

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis meliputi:

1. Klasifikasi keamanan arsip dinamis, memuat informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.
2. Pengamanan arsip, memuat pengorganisasian, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.
3. Klasifikasi akses arsip dinamis, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

C. Tujuan

Tujuan penetapan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan:

1. Menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
3. Tersedianya informasi Kementerian Ketenagakerjaan yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;
4. Terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
5. Terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan.

D. Pengertian

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
7. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah tanda pengenal urusan suatu Arsip yang terdiri atas huruf dan angka (alfanumerik) dari Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan.
9. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
10. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
13. Penggunaan Arsip adalah kegiatan menyediakan dan memanfaatkan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.

14. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan.
15. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Ketenagakerjaan.
16. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
18. Kementerian adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

A. Klasifikasi Keamanan

Arsip Dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan. Kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kerahasiaan atau keterbukaan Arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses Arsip Dinamis.

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Kementerian terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Biasa

Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

2. Terbatas

Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

3. Rahasia

Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum.

4. Sangat Rahasia

Klasifikasi informasi Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

Klasifikasi Keamanan

No	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana
1	Biasa	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana Khusus	<i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas Arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik Arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas Arsip 2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>data base</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital). 2. Pengguna untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	1. Autentikasi <i>server</i>. 2. Langkah - langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus. 3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi (<i>Intrusion</i>).
3	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Dengan akses yang terbatas	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital). 2. Pengguna untuk <i>log in</i> pada tingkat	1. Autentikasi <i>server</i>. 2. Langkah - langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus.

No	Tingkat Klasifikasi Keamanan	Media Arsip					
		Arsip Konvensional			Arsip Elektronik		
		Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana dan Sarana
		2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen yang bersifat rahasia			2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>data base</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	individual. 3. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual.	3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi (<i>Intrusion</i>).
4	Sangat Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik Arsip 2. Tidak sembarangan meletakkan Arsip/dokumen yang bersifat sangat rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Dengan akses yang terbatas	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas Arsip 2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>data base</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital). 2. Pengguna untuk <i>log in</i> pada tingkat individual. 3. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual.	1. Autentikasi server 2. Langkah - langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus. 3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi (<i>Intrusion</i>).

B. Pengamanan Arsip

1. Pengorganisasian

Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis dilakukan oleh Unit Kearsipan sesuai jenjangnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Pengamanan Arsip meliputi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Perangkat keras (*hardware*) meliputi:

- a. Sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak Arsip. Untuk menyimpan Arsip biasa disimpan pada rak besi, Arsip terbatas disimpan pada *filing cabinet*, serta Arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada brankas. Sarana penyimpanan Arsip konvensional termasuk juga Arsip media baru, antara lain: foto, video, kaset, peta, dan gambar kearsitekturan.
- b. Sarana penyimpanan Arsip elektronik berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- c. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- d. Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/CCTV, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.

Perangkat lunak (*software*) meliputi:

- a. Sarana berupa daftar Arsip aktif, Arsip inaktif, Arsip vital, dan Arsip Terjaga.
- b. Prasarana berupa aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan Arsip inaktif, dilakukan melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

3. Sumber Daya Manusia

Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di *Central File* dan di *Records Center*.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis meliputi pengguna internal dan eksternal Kementerian.

1. Pengguna Internal.

Pengguna Internal Kementerian yang dapat mengakses Arsip Dinamis meliputi:

- a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menteri Ketenagakerjaan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada level di atasnya dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada level di atasnya dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Pengawas, Arsiparis, dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, dan rahasia yang terdapat pada Menteri Ketenagakerjaan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

2. Pengguna Eksternal.

Pengguna Eksternal Kementerian yang dapat mengakses Arsip Dinamis meliputi:

- a. Publik
mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori biasa/terbuka.
- b. Pengawas eksternal
mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses mengaudit.
- c. Aparat penegak hukum
mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi.

BAB IV
PENUTUP

Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis di Kementerian disusun untuk dijadikan pedoman oleh unit kerja di Kementerian dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis dan digunakan sebagai dasar untuk melindungi informasi dari akses oleh pihak yang tidak berhak.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

DAFTAR ARSIP BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

I. FASILITATIF

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PR	PERENCANAAN					Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
	PR.00	A. Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategis Pembangunan					
	PR.00.00	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) Kementerian	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.00.01	2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.00.02	3. Rencana Strategis	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PR.00.03	4. Penyusunan Rencana Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.01	B. Program Kerja Tahunan					
	PR.01.00	1. Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.01.01	2. Usulan Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.01.02	3. Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.01.03	4. Program Kerja Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.02	C. Penetapan/Kontrak Kinerja					
	PR.02.00	1. Menteri	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.02.01	2. Pimpinan Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.03	D. Laporan					
	PR.03.00	1. Laporan Insidental	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Laporan Berkala					
	PR.03.01	a. Laporan Bulanan Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.03.02	b. Laporan Triwulanan Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.03.03	c. Laporan Semesteran Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.03.04	d. Laporan Tahunan Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.03.05	e. Laporan Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.03.06	3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)					
		a. LAKIP Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. LAKIP Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.04	E. Evaluasi Program					
	PR.04.00	1. Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.04.01	2. Evaluasi Program Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.06	F. Monitoring dan Evaluasi Program					
	PR.06.00	1. Anggaran Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	PR.06.01	2. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
2	KU	KEUANGAN					Biro Keuangan / Bagian Keuangan / Subbagian TU
	KU.00 KU.00.00	A. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN): 1. Penyusunan RAPBN - Materi Usulan Penyusunan Kebijakan Strategi dan Prioritas Bidang Ketenagakerjaan - Usulan Rancangan Program Kegiatan Anggaran - Rencana Anggaran Satuan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan - Rancangan Anggaran	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	PA PA PA PA	Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KU.00.01	2. Penyampaian RAPBN Kepada DPR - Penyampaian Usulan Bahan Nota Keuangan Bidang Ketenagakerjaan - Materi Pembahasan RAPBN Oleh Komisi DPR	Terbatas Terbatas	PA PA	Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

[illegible]

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	KU.02	C. Pelaksanaan Anggaran					
	KU.02.00	1. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang Dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, a.l. untuk:					
		- Surat Setoran bukan Pajak (SSBP)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bukti Penerimaan Pajak dan Penerimaan bukan Pajak (PNBP)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Bukti Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-Masing Satker	Biasa	PP	Terbuka		
	KU.02.01	D. Belanja					
		1. Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		2. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, a.l. untuk:					
		a. Barang habis pakai, beserta data pendukungnya, a.l.:					
		- Dokumen uang muka dan data pendukung	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penagihan/ <i>invoice</i> , kuitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya a.l.: copy faktur pajak, nota kredit, dll	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		b. Barang inventaris, beserta data pendukungnya, a.l.: - Dokumen uang muka dan data pendukung	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penagihan/<i>invoice</i>, kuitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya a.l.: copy faktur pajak, nota kredit, dll	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		c. Jasa beserta data pendukungnya, a.l.: - Dokumen uang muka dan data pendukung	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penagihan/<i>invoice</i>, kuitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		pendukungnya a.l.: copy faktur pajak, nota kredit, dll				Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		3. Dokumen Tata Usah Anggaran					
		- Buku Kas Umum (BKU)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Buku Kas Pembantu (BKP)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Rekening Koran Bank	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Daftar Gaji	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		5. Kartu Gaji	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		6. Laporan Kas: - Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Kas/ <i>register</i> penutupan kas	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan pendapatan negara	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		7. Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		8. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri atas: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Neraca - Laporan Arus Kas	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
	KU.03	E. Bantuan/Pinjaman Luar Negeri					
		1. Daftar Proyek yang akan Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Grey Book</i>)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan Dokumen Sejenisnya	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti: <i>draft agreement</i> , <i>legal opinion</i> , surat menyurat dengan tender	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		5. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l.: usulan luncuran dana	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		6. Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya: - <i>Reimbursement</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- <i>Special Commitmen/L / C Opening</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- <i>Special Account/Imprest Fund</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		7. Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		8. Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		9. <i>Replenishment</i> (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : <i>No Objection Letter (NOL)</i> , <i>Project Implementation</i> , <i>Notification of Contract</i> , <i>Withdrawal Authorization (WA)</i> , <i>Statement of Expenditure (SE)</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		10. <i>Staff Appraisal Report</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		11. <i>Report/Laporan</i> yang terdiri atas: - <i>Progress Report</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- <i>Monthly Report</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- <i>Quarterly Report</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		12. Laporan Hutang Daerah					
		- Laporan Pembayaran Hutang Daerah	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Posisi Hutang Daerah	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		13. <i>Completion Report/ Annual Report</i>	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		14. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KU.04	F. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Keputusan Menteri Tentang penetapan :					
		- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pejabat Pembuat Komitmen	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bendahara Pengeluaran	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bendahara Penerima	Biasa	PP	Terbuka		
		- Kuasa Pengguna Barang/Jasa	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pejabat Pembuat Daftar Gaji	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan	Biasa	PP	Terbuka		
	KU.05	G. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)					
		1. <i>Annual Implementation</i> SAI	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Kebijakan Akuntansi	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulanan/Semester	Biasa	PP	Terbuka		
	KU.06	H. Pertanggungjawaban Keuangan Negara					
		1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		2. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:					
		- LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Tindak Lanjut/Tanggapan LHP	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		3. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara:					
		- Tuntutan Perbendaharaan/TP	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Tuntutan Ganti Rugi/TGR	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KU.07	I. Penatausahaan Barang Milik Negara					
	KU.07.00	1. Daftar Barang Ruangan (DBR), a.l. Daftar Pengawasan dan Pengendalian Pencatatan Barang di Dalam Ruangan	Biasa	PP	Terbuka		
	KU.07.01	2. Kartu Inventaris Barang (KIB), yakni Kartu Pengawasan dan Pengendalian BMN Seperti Tanah, Bangunan Gedung, dan Alat Angkutan	Biasa	PP	Terbuka		
	KU.07.02	3. Daftar Barang Lainnya (DBL), yakni Berkaitan dengan Daftar untuk Mencatat Barang yang tidak Tercatat dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu Identitas Barang (KIB)	Biasa	PP	Terbuka		
	KU.07.03	4. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)	Biasa	PP	Terbuka		
3	OT	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN					Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur / Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan
	OT.00	A. Struktur Organisasi di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan					
		- Pembentukan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pengubahan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pembubaran	Biasa	PP	Terbuka		
	OT.01	B. Analisis Jabatan	Biasa	PP	Terbuka		
	OT.02	C. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Biasa	PP	Terbuka		
	OT.03	D. Analisis Beban Kerja	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	OT.04	E. Ketatalaksanaan : - SOP/Prosedur Tetap - Mekanisme Kerja/Tata Hubungan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	OT.05	F. Reformasi Birokrasi	Biasa	PP	Terbuka		
	OT.06	G. Evaluasi Jabatan	Biasa	PP	Terbuka		
4	KP	KEPEGAWAIAN					Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur / Bagian Kepegawaian Tiap Unit
	KP.00	A. Formasi Pegawai:					
	KP.00.00	1. Usulan dari Unit Kerja/Satuan Kerja	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Analisis Jabatan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Beban Kerja	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.00.01	2. Usulan Permintaan Formasi Kepada MenPAN & RB dan Kepala BKN	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.00.02	3. Persetujuan MenPAN & RB	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.00.02	4. Penetapan Formasi PNS	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.00.02 KP.01	5. Penetapan Formasi Khusus B. Penerimaan Pegawai 1. Proses Penerimaan Pegawai meliputi : - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Test - Pelaksanaan Ujian tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara/Litsus 2. Penetapan Pengumuman Kelulusan 3. Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP PP PP PP PA	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.02	C. Pengangkatan Pegawai 1. Nota usul kelengkapan penetapan NIP 2. Usulan Pengangkatan CPNS/PNS - Berkas Lamaran diterima - Surat Keterangan hasil penelitian/ <i>screening</i> - Berkas Usulan CPNS/PNS 3. SK CPNS dan PNS Kolektif/ASN 4. SK Perseorangan (petikan)	Biasa Biasa Biasa Terbatas Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP PA PP PP PA	Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.03 KP.04	D. Prajabatan E. Pengangkatan Jabatan Struktural F. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Biasa Biasa Rahasia	PP PP PPTM	Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.05 KP.06 KP.07	G. Pemberhentian Jabatan Struktural H. Pengangkatan Jabatan Fungsional I. Pemberhentian Jabatan Fungsional	Biasa Biasa Terbatas	PA PP PA	Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.08 KP.08.00	J. Pembinaan Karir Pegawai 1. Pendidikan, yaitu Arsip Catatan Pegawai meliputi: Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, Diklat/Kursus/Magang, Tugas/Izin Belajar, dan STTPL	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.08.01	2. Disiplin Pegawai, a.l.: Daftar Hadir, Rekapitulasi Daftar Hadir, Berkas Pelanggaran dan Hukuman Disiplin	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.08.02 KP.08.03	3. Peninjauan Masa Kerja (PMK) 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Biasa Terbatas	PP PA	Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.08.04	5. Proses Penetapan Angka Kredit	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
	KP.08.05	6. Penyelesaian Proses Keberatan Pegawai	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.09	K. Mutasi Pegawai :					
	KP.09.00	1. Proses Kenaikkan Pangkat/Golongan/Jabatan	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.09.01	2. Proses Kenaikkan Gaji Berkala	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.09.02	3. Mutasi Keluarga					
		- Surat Izin Pernikahan/Perceraian	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Penolakan Ijin Pernikahan/Perceraian	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Akte Kelahiran Anak	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KP.09.03	4. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.09.04	5. Alih Status, Pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan/Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi ke Balai/UPT dan Mutasi Antar Unit Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Usulan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Biasa	PP	Terbuka		
		6. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.10	L. Pendelegasian Wewenang					
	KP.10.00	1. Pelaksana Tugas (Plt.)	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.10.01	2. Pelaksana Harian (Plh.)	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.11	M. Administrasi Pegawai :					
	KP.11.00	1. Berkas Perseorangan Pejabat Negara	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.00	2. Data/Keterangan Pegawai (<i>Personal Files</i>)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
		- Lamaran	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
		- Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pengangkatan CPNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
		- Hasil Pengujian Kesehatan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SK Pengangkatan PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Kenaikan Pangkat	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/ Surat Pernyataan Pelantikan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Perpindahan Wilayah Kerja	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Perpindahan Antar Instansi	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Peninjauan Masa Kerja	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Berita Acara Pemeriksaan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Perbantuan Kepala Daerah Otonomi/instansi Lain	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Penarikan Kembali dari Perbantuan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pemberian Uang Tunggu	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pemberhentian sebagai PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pemberhentian Sementara	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pengalihan PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Keterangan Pernyataan Hilang	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pergantian Nama	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Perbaikan tanggal dan tahun kelahiran PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pensiun	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Isian Formulir Pendataan Ulang PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Izin Menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Pencabutan Izin Menjadi Anggota Parpol	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Keterangan Mutasi Keluarga	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Keterangan Penyesuaian Gelar Akademik	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Penetapan Angka Kredit	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Pemberhentian Kenaikan Gaji Berkala	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Surat Izin Berpergian	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Kartu Induk PNS	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- Ijasah/Sertifikat	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Penempatan/Penarikan Pegawai	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		- SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan Diluar Instansi	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SK Pertimbangan Status PNS - SK Persetujuan/ Penugasaan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara - Surat Keterangan Pengunduran Diri dari/ diberhentikan sebagai PNS karena menjadi pengurus/ anggota Parpol - Surat Keterangan Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri sebagai calon Kepala Daerah - SK Pemberhentian dari Jabatan Negeri sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah - SK Mempekerjakan kembali sebagai PNS setelah tidak terpilih sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
			Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
			Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
			Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
			Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
			Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.01	2. Kartu Pegawai	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.02	3. Karis/ Karsu	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.11.03	4. Kartu Taspen	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.04	5. Kartu Jaminan Kesehatan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.05	6. Tanda Jasa	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.06	7. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.07	8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pegawai (LHKPN)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.11.08	9. Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
	KP.12	N. Cuti Pegawai					
	KP.12.00	1. Cuti Tahunan	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.12.01	2. Cuti Besar	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.12.02	3. Cuti Sakit	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.12.03	4. Cuti Bersalin	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.12.04	5. Cuti Karena Alasan Penting	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.12.05	6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.13	O. Kesejahteraan Pegawai					
		1. Pakaian Dinas	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Asuransi Pegawai	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Tabungan Perumahan	Biasa	PP	Terbuka		
		5. Olahraga/Rekreasi/Kesenian	Biasa	PP	Terbuka		
		6. Bantuan Sosial	Biasa	PP	Terbuka		
		7. Kesejahteraan Pegawai	Biasa	PP	Terbuka		
	KP.14	P. Proses Pemberhentian Pegawai/Pensiun					
	KP.14.00	1. Dengan Hormat	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
	KP.14.01	2. Dengan Tidak Hormat	Rahasia	PPTP	Rahasia	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
	KP.15	Q. Keputusan Pemberhentian Pegawai/Pensiun	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	
	KP.16	R. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak- Hak Privasi Pegawai	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	KP.17	S. Organisasi Non Kedinasan 1. KORPRI 2. Dharma Wanita 3. Koperasi 4. Yayasan 5. Lain-Lain	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
5	HK	HUKUM					Biro Hukum/ Bagian Hukum
	HK.00	A. Program Legislasi					
	HK.00.00	1. Bahan/materi program legislasi nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.00.01	2. Program legislasi Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.01	B. Rancangan Peraturan Perundang-undangan					
	HK.01.00	1. Rancangan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.01.01	2. Rancangan Peraturan Pemerintah	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.01.02	3. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.02	C. Peraturan Menteri	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.03	D. Keputusan Menteri/Pejabat Pimpinan Tinggi					
	HK.03.00	1. Keputusan Menteri	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.03.01	2. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.04	E. Surat Edaran					
	HK.04.00	1. Surat Edaran Menteri	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.06	F. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/Internasional	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.07	G. Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/ Kontrak/Kerja Sama Dalam Negeri	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	HK.08	H. Dokumentasi Hukum					
		1. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.09	I. Telaah Hukum					
		- Berkas Kajian/Telaah Hukum	Biasa	PP	Terbuka		
		- Opini Hukum	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.10	J. Sosialisasi/Penyuluhan Produk Hukum	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.11	K. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi					
		Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Biasa	PP	Terbuka		
	HK.12	L. Kasus/Sengketa Hukum					
	HK.12.00	1. Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		- Penyidikan, penyelidikan sampai dengan putusan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		- berkas pembelaan dan bantuan hukum	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	HK.12.01	2. Berkas tentang kasus/sengketa perdata:	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	HK.12.02	- Mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian para pihak, kesimpulan para pihak sampai dengan putusan - Upaya hukum lanjutan 3. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara: - Mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian para pihak, kesimpulan para pihak sampai dengan putusan - Upaya hukum lanjutan	Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia	PPTP PPTP PPTP PPTP PPTP PPTP	Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian Dapat mengganggu kinerja Kementerian Dapat mengganggu kinerja Kementerian Dapat mengganggu kinerja Kementerian Dapat mengganggu kinerja Kementerian Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	HK.12.04	5. Uji Materi Mahkamah Agung Berkas mengenai uji materi perundang-undangan di bawah undang-undang mulai dari permohonan dan jawaban termohon disertai alat bukti surat sampai putusan Mahkamah Agung RI	Rahasia Rahasia	PPTP PPTP	Tertutup Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian Dapat mengganggu kinerja Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Uji Materi Mahkamah Konstitusi	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		Berkas mengenai uji materi undang-undang mulai dari permohonan, keterangan pemerintah dan pihak terkait, tanggapan pemerintah dan pihak terkait, saksi fakta dan ahli para pihak dan kesimpulan para pihak sampai dengan putusan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
6	UM	UMUM					Biro Umum
	UM.00	Kearsipan dan Ketatausahaan					
	UM.00.00	A. Administrasi Persuratan	Biasa	PP	Terbuka		
		1. Buku agenda	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Lembar pengantar/buku ekspedisi	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen /arsip	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.00.01	B. Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa	PP	Terbuka		
		1. Daftar arsip:	Biasa	PP	Terbuka		
		- Arsip Aktif	Biasa	PP	Terbuka		
		- Arsip Inaktif	Biasa	PP	Terbuka		
		- Arsip Vital	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Daftar arsip informasi publik	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.00.02	C. Layanan Arsip (Peminjaman, Penggunaan Arsip)	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.00.03	D. NSPK Kearsipan	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.00.04	E. Penyusutan Arsip (Pemindahan Arsip Inaktif)					
		- Berita acara pemindahan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Daftar arsip yang dipindahkan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	UM.00.05	F. Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip) - Berita acara pemusnahan - Daftar arsip yang dimusnahkan - Persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI - Surat Keputusan pemusnahan dari Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	UM.00.06	G. Penyusutan Arsip (Penyerahan Arsip Statis) - Berita acara serah terima arsip - Daftar arsip yang diserahkan	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
	UM.00.07	H. Pembinaan Kearsipan - Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya/<i>workshop</i> - Bimbingan teknis - Supervisi dan monitoring	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	UM.01	Kerumahtanggaan					
	UM.01.00	A. Pemeliharaan Gedung dan Taman - Pertamanan (<i>landscaping</i>) - Penghijauan - Perbaikan Gedung - Perbaikan rumah dinas/wisma - Kebersihan gedung dan taman	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	UM.01.01	B. Pengelolaan Jaringan listrik, Air, Telepon, dan Komputer 1. Perbaikan/pemeliharaan 2. Pemasangan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	UM.01.02	C. Pengurusan Kendaraan Dinas - pengurusan surat-surat kendaraan dinas - pemeliharaan dan perbaikan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.01.03	D. Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor (Permintaan dan Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas)	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.01.04	E. Pengadaan Barang :	Biasa	PP	Terbuka		
		1. Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Dokumen lelang	Biasa	PP	Terbuka		
		- Barang Inventaris Kantor/barang bergerak, (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang).	Biasa	PP	Terbuka		
		- Barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang).	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.01.05	F. Pengamanan	Biasa	PP	Terbuka		
		1. Pengamanan lingkungan Kementerian	Biasa	PP	Terbuka		
		- Daftar piket satpam/ <i>security</i>	Biasa	PP	Terbuka		
		- Buku/formulir tamu	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pengaturan akses masuk Kementerian	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.01.05	G. Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.01.05	H. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.01.06	I. Pelayanan Kesehatan/Poliklinik	Biasa	PP	Terbuka		
		1. Kartu Berobat Pegawai	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Rekam Medis (<i>Medical Records</i>) Pegawai	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Hak-Hak Privasi Pegawai	
		3. Daftar Piket Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, dll)	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Administrasi Lainnya	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.02	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	UM.03	Pengelolaan Perlengkapan					
	UM.03.00	A. Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.03.01	B. Distribusi BMN	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.03.02	C. Inventarisasi BMN	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.03.03	D. Penghapusan BMN	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.03.04	E. Pelaporan BMN	Biasa	PP	Terbuka		
	UM.04	Telekomunikasi : Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi telepon, faksimile, radio, teleks, TV kabel, dan internet	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.05	Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.05.00	A. Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		- Daftar nama satuan pengamanan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Daftar jaga/daftar piket	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	UM.05.01	- Catatan gangguan/demonstrasi/pelanggaran dan kejadian - Surat izin keluar masuk orang atau barang B. Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa Biasa Terbatas	PP PP PA	Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
	UM.06	- Kehilangan - Kecelakaan - Gangguan Keprotokolan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	UM.06.00	A. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan, termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)	Biasa	PP	Terbuka		
		B. Buku Tamu	Biasa	PP	Terbuka		
		C. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	Biasa	PP	Terbuka		
		D. Perjalanan Dinas	Biasa	PP	Terbuka		
		- Dalam Negeri - Luar Negeri	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
	UM.06.01	E. Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi	Biasa	PP	Terbuka		
		F. Kunjungan Dinas Elite	Biasa	PP	Terbuka		
		- Kunjungan Presiden, Wapres, Pejabat Negara/Anggota Dewan - Tamu Luar Negeri	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
	UM.06.02	G. Agenda Kegiatan Pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		H. Risalah/Notulen Rapat	Biasa	PP	Terbuka		
		- Rapat Pimpinan - Rapat Staf	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
7	KS	KERJA SAMA LUAR NEGERI					Biro Kerja Sama Luar Negeri/ Bagian Kerja Sama Luar Negeri
	KS.00	A. MoU/Hubungan Kerjasama Luar Negeri dimulai dari penjajagan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KS.00.00	1. Kerjasama Bilateral	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KS.00.01	2. Kerjasama Regional	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KS.00.02	3. Kerjasama Multilateral	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	KS.01	B. Bantuan Teknis	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		1. Bantuan Keuangan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		2. Bantuan Tenaga Ahli	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KS.02	3. Bantuan Beasiswa	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian		
		4. Bantuan Prasarana dan Sarana	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian		
		C. Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian		
		1. Pembahasan Konvensi dan Perjanjian Internasional	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian		
		2. Tindak Lanjut Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian		
		3. Monitoring Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian		
	KS.03	D. Kunjungan Misi Luar Negeri/Perwakilan Asing	Biasa	PP	Terbuka			
		1. Kunjungan Delegasi ke Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka			
		2. Penerimaan Kunjungan Misi/Perwakilan Asing	Biasa	PP	Terbuka			
	KS.04	3. Penyediaan Bahan Informasi	Biasa	PP	Terbuka			
		E. Pertemuan Ilmiah	Biasa	PP	Terbuka			
		Kongres, konferensi, seminar dan/atau lokakarya yang terkait dengan kerjasama luar negeri dan diselenggarakan baik di dalam/luar negeri mulai dari perencanaan sampai dengan laporan	Biasa	PP	Terbuka			

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		ilmiah					
	KS.05	F. Promosi dan Investasi promosi, investasi dan perdagangan internasional mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
8	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT					Biro Hubungan Masyarakat
	HM.00	A. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan, dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, Dalam Berbagai Media: Kertas/Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia : - Menteri Ketenagakerjaan - PPTM - Pejabat lain/pegawai	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	HM.01	B. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan: 1. Kliping koran 2. Brosur/ <i>leaflet</i> /poster/plakat 3. Pengumuman/pemberitaan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	HM.02	C. Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan/Instansi :					
	HM.02.00	1. Hubungan antar badan pemerintah	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.02.01	2. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.02.02	3. Hubungan dengan perusahaan	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.02.03	4. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.02.03	5. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah mengenai magang, pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL)	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.02.04	6. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.02.05	7. Hubungan dengan media massa: - Siaran pers/konferensi pers/ <i>press release</i> /wawancara - Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	HM.03	D. Dokumen Persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Menteri Ketenagakerjaan): 1. Bahan sidang kabinet 2. RDP DPR/DPD RI 3. Rakor tingkat Badan termasuk hasil rumusan dan transkrip 4. Bahan rapat terbatas Kementerian Ketenagakerjaan 5. Pidato Menteri Ketenagakerjaan 6. Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Bidang Ketenagakerjaan	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	HM.04	E. Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal, Serta Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.06	F. Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.07	G. Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan - Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.08	H. Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf dan lain-lain	Biasa	PP	Terbuka		
	HM.09	I. Layanan Kehumasan: - Layanan Informasi Publik - Layanan Website	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
9	HM.10	PERPUSTAKAAN					Biro Hubungan Masyarakat
	HM.10.00	A. Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka : 1. Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit 2. Administrasi pengelolaan Deposit Bahan Pustaka	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
	HM.10.01	B. Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka : 1. Buku Induk Koleksi	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	HM.11 HM.11.00 HM.11.01 HM.12	2. Daftar buku terseleksi 3. Daftar buku dalam pemesanan 4. Daftar buku dan permintaan 5. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah 6. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus 7. Lembar kerja pengolahan BP (Boram, Pengkatalogan) 8. <i>Shelf list</i> /Jajaran Kartu Utama (<i>master list</i>) 9. Daftar tambahan Buku (<i>Accession list</i>) 10. Daftar/jajaran kendali (Subjek dan Pengarang) C. Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi : 1. Data dan statistik anggota, pengunjung, dan peminjaman bahan pustaka 2. Pertanyaan rujukan dan jawaban D. Preservasi Bahan Pustaka 1. Survei kondisi bahan pustaka 2. Reprografi bahan pustaka	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
10	RK	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN					Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
	RK.00 RK.00.00	A. Perencanaan Ketenagakerjaan 1. Pengukuran dan Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan a. Perencanaan - TOR - Renlakgiat b. Pelaksanaan	Terbatas Biasa	PA PP	Tertutup Terbuka	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	RK.00.02	- RTK Provinsi - RTK Kabupaten/Kota - Bahan/Modul Bimbingan/TOT/ Supervisi Penyusunan PTK Makro c. Pelaporan - Laporan Kegiatan	Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		3. Perencanaan Ketenagakerjaan Mikro					
		a. Perencanaan					
		- TOR - Renlakgiat	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
		b. Pelaksanaan					
		- Penyusunan peraturan tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro - Penyusunan Keputusan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro Bagi Perusahaan Pemerintah/Swasta - Pedoman Penyusunan PTK Mikro Bagi Perusahaan Pemerintah/Swasta - Bahan/Modul Bimbingan/TOT/Supervisi Penyusunan PTK Mikro - Proyeksi Kebutuhan Pasar Kerja Indonesia untuk Rentang Waktu Tertentu - RTK Perusahaan	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP PP PP PA	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup		
		c. Pelaporan					
		- Laporan Kegiatan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
11	TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan / Pusat Data dan Informasi
	TI.00	A. Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.01	B. Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi :					
		1. Sistem Informasi	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Sistem Aplikasi	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Infrastruktur	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.02	C. Perekaman dan Pemutakhiran Data :					
		1. Formulir Isian	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Daftar Petugas Perekaman	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Jadwal Pelaksanaan	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.03	D. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data :					
		1. Perencanaan Migrasi	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Pelaksanaan Migrasi	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Berita Acara Kegiatan Migrasi	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi	Biasa	PP	Terbuka		
		5. Laporan hasil migrasi	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.04	E. Dokumen <i>Hosting</i>					
		1. Formulir permintaan hosting	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Laporan hasil uji kelayakan	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Laporan pelaksanaan <i>hosting</i>	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.05	F. Layanan <i>Back-up</i> Data Digital	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	TI.06	G. <i>Database</i>	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.07	H. <i>Design</i> Informasi dan Komunikasi	Biasa	PP	Terbuka		
	TI.08	I. Evaluasi Sistem dan Media	Biasa	PP	Terbuka		
	RK.01	J. Data Ketenagakerjaan					
		1. Pelatihan dan Produktivitas					
		a. Instruktur di Lembaga Pelatihan Pemerintah Menurut Provinsi dan Kejuruan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Rekap Instruktur Swasta Menurut Sektor Tahun	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Pengelola Pelatihan di Lembaga Pelatihan Pemerintah Menurut Provinsi dan UPTP/UPTD	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Data Sertifikasi Per Sektor Tahun	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Rekap SKKNI Yang Sudah ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan Per Sektor Tahun	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Sertifikasi di Indonesia	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Program Pelatihan di Indonesia	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Pemagangan Luar Negeri di Indonesia	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Penempatan Tenaga Kerja					
		a. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Provinsi Asal dan Jenis Kelamin	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Perkembangan Tenaga Kerja PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor Tahun	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Provinsi Asal	Biasa	PP	Terbuka		
		d. IPK	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Lowongan Kerja Terdaftar di Indonesia	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Penggunaan TKA di Indonesia	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Kesempatan Kerja Akibat Investasi	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Data Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial					

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di Indonesia Menurut Provinsi	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penerima Upah di Indonesia Menurut Provinsi	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Lembaga Kerja Sama Tripartit di Indonesia Menurut Provinsi	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pekerja/Buruh Pada Perusahaan Pemborongan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Outsourcing</i> /Alih Daya) di Indonesia Menurut Provinsi	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Pegawai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Peraturan Perusahaan (PP)	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Jumlah Perusahaan	Biasa	PP	Terbuka		
		i. Tripartit	Biasa	PP	Terbuka		
		j. Bipartit	Biasa	PP	Terbuka		
		k. PPPHI	Biasa	PP	Terbuka		
		l. UMP dan KHL	Biasa	PP	Terbuka		
		5. Pengawasan Tenaga Kerja					
		a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Jenis Pelanggaran Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Perusahaan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Objek Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Penerbitan Izin K3	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Kegiatan Pemeriksaan Ketenagakerjaan (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia)	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Jenis Pelanggaran Norma K3	Biasa	PP	Terbuka		
		i. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika	Biasa	PP	Terbuka		
		K. Ketenagakerjaan Umum					
		1. Nasional					
		a. Penduduk Usia Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Angkatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Penduduk Yang Bekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Setengah Penganggur	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Penganggur Terbuka	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Provinsi					
		a. Penduduk Usia Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Angkatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Penduduk Yang Bekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Setengah Penganggur	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Penganggur Terbuka	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Kabupaten/Kota					
		a. Penduduk Usia Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Angkatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Penduduk Yang Bekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Setengah Penganggur	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Penganggur Terbuka	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
12	LB	PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN					Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan / Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
	LB.00	A. Administrasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat)	Biasa	PP	Terbuka		
	LB.01	B. Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (Mulai Rancangan Awal sampai dengan Akhir termasuk Catatan-Catatan Perkembangan dan <i>Log Book</i>) 1. hasil penelitian dan pengembangan 2. hasil pengkajian kebijakan dan strategi	Biasa	PP	Terbuka		
	LB.02	C. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	PP	Terbuka		
	LB.03	D. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	PP	Terbuka		
	LB.04	E. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	PP	Terbuka		
	LB.05	F. Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan 1. data 2. statistik 3. jurnal hasil penelitian/pengkajian	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	LB.06	G. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	PP	Terbuka		
	LB.07	H. Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i>	Biasa	PP	Terbuka		
	RK.02.00	I. Penelitian Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 1. Rancangan Program Penelitian 2. Hasil Penelitian 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	RK.00.01	J. Penelitian Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 1. Rancangan Program Penelitian 2. Hasil Penelitian 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	RK.00.02	K. Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan 1. Rancangan Program Penelitian 2. Hasil Penelitian 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
13	PW	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN					Inspektorat Jenderal
	PW.00	A. Rencana Pengawasan :					
	PW.00.00	1. Rencana Strategis Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.00.01	2. Rencana Kerja Tahunan	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.00.02	3. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.00.03	4. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.01	B. Audit					
		1. Audit Operasional	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		2. Audit Kinerja	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		3. Audit Dengan Tujuan Tertentu	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	
		4. Kegiatan Audit Lainnya (Surat Penugasan, Pemberitahuan dan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan)					
	PW.02	C. <i>Review</i> 1. Pelaksanaan <i>Review</i> Dokumen Rencana Keuangan 2. <i>Review</i> Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan baik Semesteran maupun Tahunan 3. Surat Penugasan, Surat Pemberitahuan, dan Pelaporan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	PW.03	D. Evaluasi 1. Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi 3. Evaluasi Lainnya yang Meliputi Surat Penugasan, Pemberitahuan, dan Pelaporan	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
	PW.04	E. Laporan Hasil Pengawasan 1. Proses Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 2. APIP Semesteran 3. APIP Tahunan 4. Tanggapan atas LHP 5. Tindak Lanjut atas Laporan	Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia Rahasia	PPTP PPTP PPTP PPTP PPTP	Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.05	F. Pemantauan					
	PW.05.00	1. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.05.01	2. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PW.05.02	3. Penerapan <i>Early Warning System</i>	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.06	G. Kegiatan Pengawasan Lainnya					
		1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Bimbingan dan Konsultasi	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Pengelolaan Hasil Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
		5. Pemaparan Hasil Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
		6. Keikutsertaan dalam Forbes APIP dan Forkom Lainnya	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.07	H. Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, serta Evaluasi Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan					
		1. Penyiapan Bahan Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, serta Indikator Kinerja Utama	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data dan Informasi Kegiatan Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Penyiapan Bahan Pemantauan dan Evaluasi Rencana, Program dan Anggaran	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Penyusunan Laporan dan Kegiatan Pengawasan	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.08	I. Pedoman Kebijakan Pengawasan					
		1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		3. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biasa	PP	Terbuka		
		5. Peraturan Menteri Keuangan	Biasa	PP	Terbuka		
	PW.09	J. Pengelolaan Urusan Pengawasan Masyarakat					
		1. Penyiapan Bahan Analisis dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Masyarakat	Biasa	PP	Terbuka		
		2. Penyiapan Bahan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengawasan					
	PW.10	K. Pelaksanaan Pengawasan :					
	PW.10.00	1. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.01	- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut.	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.02	2. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.03	- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Rahasia	PPTM	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.04	3. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.05	4. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		5. Laporan Verifikasi Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.07	6. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i> Kementerian Ketenagakerjaan.	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.10.08	7. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
	PW.11	L. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					
	PW.11.00	1. Nota Dinas Penyampaian dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.11.01	2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.11.02	3. Laporan Hasil Pengawasan BPK	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.12	M. Hasil Analisis Laporan Pengawasan					
	PW.12.00	1. Penyiapan Bahan Koordinasi, Pengumpulan, Telaahan serta Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PW.12.01	2. Penyiapan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	Rahasia	PPTP	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
14	DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI					Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan
	DL.00	A. Perencanaan Diklat					
	DL.00.00	1. Perencanaan Kebutuhan	Biasa	PP	Terbuka		
	DL.00.01	2. Pedoman, Sistem, dan Metode	Biasa	PP	Terbuka		
	DL.00.02	3. Kurikulum, Modul, dan Silabus	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	DL.00.04	4. Konsultasi dan Koordinasi Kediklatan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	DL.01	B. Akreditasi Lembaga Diklat	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		1. surat permohonan akreditasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		2. laporan hasil verifikasi lapangan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		3. berita acara rapat verifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		4. berita acara rapat tim penilai	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		5. surat keputusan penetapan akreditasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		6. sertifikasi akreditasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	DL.02	7. laporan akreditasi lembaga diklat	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		C. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kediklatan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		1. surat permohonan sertifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		2. laporan hasil verifikasi lapangan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. berita acara rapat verifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		4. berita acara rapat tim penilai	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		5. surat keputusan penetapan sertifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		6. sertifikasi sertifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		7. laporan sertifikasi individual	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	DL.03	D. Sistem Informasi Diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		1. data lembaga diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		2. data prasarana diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		3. data sarana diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		4. data pengelola diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		5. data penyelenggara diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		6. data widyaiswara	Biasa	PP	Terbuka		
		7. data program diklat	Biasa	PP	Terbuka		
	DL.04	E. Registrasi Sertifikasi/STTPL Peserta Diklat	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		1. surat permohonan kode registrasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		2. buku registrasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		3. surat penyampaian kode registrasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	DL.05	F. Penyelenggaraan Diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		1. surat pemanggilan peserta	Biasa	PP	Terbuka		
		2. surat keputusan tim penyelenggaraan diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		3. surat keputusan tim pengajar diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		4. panduan diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		5. laporan panitia penyelenggaraan diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		6. daftar peserta diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		7. bahan ajar diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		8. daftar hadir peserta diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		9. daftar hadir widyaiswara	Biasa	PP	Terbuka		
		10. formulir evaluasi diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		11. formulir evaluasi widyaiswara	Biasa	PP	Terbuka		
		12. hasil formulasi evaluasi peserta diklat	Biasa	PP	Terbuka		
		13. sertifikat STTPL	Biasa	PP	Terbuka		
		14. sambutan penutupan diklat	Biasa	PP	Terbuka		
	DL.06	G. Laporan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	PP	Terbuka		
	DL.06.00	H. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	PP	Terbuka		
	DL.06.01	I. Evaluasi Alumni Pasca Diklat	Biasa	PP	Terbuka		

Keterangan:

PPTM = Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

PPTP = Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

PA = Pejabat Administrator

PP = Pejabat Pengawas

II. SUBSTANTIF

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIJ	PERUMUSAN KEBIJAKAN					
		Kebijakan di bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan - Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa	PP	Terbuka		Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnaker; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3
		- Penyiapan Bahan	Biasa	PP	Terbuka		Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnaker; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3
		- Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan	Biasa	PP	Terbuka		Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnaker;

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pengumpulan dan Pengolahan Data - Penetapan dalam Bentuk Pengaturan Berupa Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3 Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnaker; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3 Ditjen Binalattas; Ditjen Binapentasnaker; Ditjen PHI dan Jamsostek; Ditjen Binwasnaker dan K3
2	LP	PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS					Ditjen Binalattas
	LP.00 LP.00.00	A. Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja 1. Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi a. Bimbingan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja dan Kualifikasi Nasional b. Pemaketan KKNi Sektor c. Penyusunan Peta Profesi	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja dan Kualifikasi Nasional e. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Sektor f. Hamonisasi Penerapan SKKNI dan KKNi	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.00.01	2. Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		a. Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) b. Penyusunan Modul PBK c. Penyusunan Pedoman Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.00.02	3. Pengembangan Sistem dan Metode Pelatihan kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		a. Bimbingan Pengembangan Metode PBK b. <i>Indonesia Skill Competition</i> (ISC) (Seleksi Nasional Calon Kompetisi <i>Asian Skill Competition</i>/ASC) c. Pemusatan Pelatihan (TC) I ASC d. Penyusunan <i>Test Project</i> Selekdan dan Seleknas ASC e. Keikutsertaan Indonesia pada <i>Organization Committee Meeting</i> (OCM) ASC f. Penyusunan Materi Pasca <i>Organizing Committee Meeting</i> (OCM) ASC	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.00.03	4. Pengembangan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelatihan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		a. Pendampingan Penerapan PBK di Lembaga Latihan Kerja b. Evaluasi Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.01	B. Bina Kelembagaan Pelatihan					Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
	LP.01.00	1. Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan					
		a. Bantuan Peralatan Pelatihan - Proposal Pengajuan Peralatan Pelatihan - SK Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Pelatihan	Biasa Terbatas	PP PP	Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peralatan Pelatihan - Proposal Pengajuan Peralatan Pelatihan Yang Ditolak	Biasa	PP	Terbuka		
		- Dewan Pelatihan Kerja Nasioal (DPKN) - SK Penetapan Keanggotaan DPKN - Hasil Kajian DPKN - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pelatihan Kerja Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK Penetapan Keanggotaan DPKN - Hasil Kajian DPKN - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pelatihan Kerja Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		- Hasil Kajian DPKN - Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pelatihan Kerja Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pelatihan Kerja Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		- Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Dengan Industri (FKLPI) - SK Penetapan Keanggotaan FKLPI - SK Penetapan Keanggotaan FKLPI Daerah - Data Kemitraan BLK dengan Industri (MoU) - Data Kerjasama Kemnaker dengan Kemenkominfo (MoU) - Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK Penetapan Keanggotaan FKLPI - SK Penetapan Keanggotaan FKLPI Daerah - Data Kemitraan BLK dengan Industri (MoU) - Data Kerjasama Kemnaker dengan Kemenkominfo (MoU) - Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK Penetapan Keanggotaan FKLPI Daerah - Data Kemitraan BLK dengan Industri (MoU) - Data Kerjasama Kemnaker dengan Kemenkominfo (MoU) - Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- Data Kemitraan BLK dengan Industri (MoU) - Data Kerjasama Kemnaker dengan Kemenkominfo (MoU) - Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- Data Kerjasama Kemnaker dengan Kemenkominfo (MoU) - Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan - Kios 3 in 1 - Laporan Kegiatan Kios 3 in 1	Biasa	PP	Terbuka		
		- Kios 3 in 1 - Laporan Kegiatan Kios 3 in 1	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Kegiatan Kios 3 in 1	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.01.01	2. Standar Mutu Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja a. Standar Minimum Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) b. Pedoman Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) c. Pedoman <i>Vocational Identification Number</i> (VIN) BLK d. Standar Peralatan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) Elektronik e. Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las f. Standar Peralatan Motor Tempel g. Standar Peralatan Sepeda Motor h. Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		a. Standar Minimum Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) b. Pedoman Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) c. Pedoman <i>Vocational Identification Number</i> (VIN) BLK d. Standar Peralatan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) Elektronik e. Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las f. Standar Peralatan Motor Tempel g. Standar Peralatan Sepeda Motor h. Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Standar Minimum Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) - Pedoman Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - Pedoman <i>Vocational Identification Number</i> (VIN) BLK - Standar Peralatan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) Elektronik - Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las - Standar Peralatan Motor Tempel - Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pedoman Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) - Pedoman <i>Vocational Identification Number</i> (VIN) BLK - Standar Peralatan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) Elektronik - Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las - Standar Peralatan Motor Tempel - Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pedoman <i>Vocational Identification Number</i> (VIN) BLK - Standar Peralatan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) Elektronik - Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las - Standar Peralatan Motor Tempel - Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Standar Peralatan <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) Elektronik - Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las - Standar Peralatan Motor Tempel - Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Standar Peralatan <i>Competency Based Training</i> (CBT) Las - Standar Peralatan Motor Tempel - Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Standar Peralatan Motor Tempel - Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Standar Peralatan Sepeda Motor - Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Standar Peralatan CBT Bangunan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	LP.01.02	i. Standar Peralatan BLK 3. Perizinan dan Akreditasi Lembaga (LA) a. SK Penetapan LA-LPK b. Borang-Borang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Balai Latihan Kerja (LPKS/BLK) c. SK Panitia Seleksi Anggota LA-LPK d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi	Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	LP.02 LP.02.00	C. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 1. Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah a. Peningkatan Kompetensi Instruktur - Diklat Alih Kategori - Bimbingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah - Bimbingan Tim Penilai Angka Kredit - Pelatihan (<i>Neuro Linguistic Programming</i>) NLP Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah - Pelatihan Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah b. Pengembangan Karier Instruktur - <i>Upgrading</i> Instruktur - Penilaian Angka Kredit - Revisi Juklak/Juknis Tentang Jabatan Fungsional Instruktur (PermenPAN) - Diklat Dasar Instruktur Kejuruan <i>Prosessing</i> (PHP) - Metodologi Pelatihan Instruktur	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
	LP.02.01	2. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta a. Peningkatan Kompetensi Instruktur - Diklat Alih Kategori b. Pengembangan Karier Instruktur	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	LP.02.02	- <i>Upgrading</i> Instruktur - Penilaian Angka Kredit - Metodologi Pelatihan Instruktur	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
	LP.02.03	3. Tenaga Pelatihan Pemerintah					
		a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan					
		- Pelatihan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Penyusunan Beban Kerja Jabatan Tenaga Pelatihan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Pengembangan Karier Tenaga Pelatihan	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.03	4. Instruktur dan Lembaga Pelatihan Swasta					
		a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan					
		- Pelatihan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Pengembangan Karier Tenaga Pelatihan	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.03.00	D. Bina Pemagangan					Direktorat Bina Pemagangan
		1. Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri (Mulai dari Program sampai dengan Penyelenggaraan)					
		a. Program Pemagangan Pencari Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Harmonisasi Program Pemagangan di Perusahaan	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Bimtek Penyelenggara Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Bimbingan Pendamping Peserta Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Perluasan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Pencanangan Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten	Biasa	PP	Terbuka		
		i. Pelaksanaan Sertifikasi Sektor	Biasa	PP	Terbuka		
		j. Regulasi Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	LP.03.01	2. Pengembangan Pemagangan Luar Negeri (Mulai dari Program sampai dengan Penyelenggaraan)					
		a. Program Pemagangan Pencari Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Koordinasi dan Konsolidasi Negara Penerima Pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Rakor Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pelatihan Persiapan Pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Regulasi Pengembangan Pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.03.02	3. Perizinan dan Advokasi Pemagangan					
		a. Verifikasi Penerbitan Izin Lembaga Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Mediasi Advokasi Penyelenggara pemagangan Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Regulasi Terkait Kegiatan Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.03.03	4. Pengembangan Jejaring Pemagangan					
		a. Pembentukan Forum komunikasi Jejaring Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Regulasi Terkait Kegiatan Pengembangan Jejaring Pemagangan	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.04	E. Bina Produktivitas dan Kewirausahaan					Direktorat Bina Produktivitas
	LP.04.00	1. Pengukuran dan Analisis Produktivitas					
		a. Pengukuran Produktivitas	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Review Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Produktivitas	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Bimtek Pengukuran Produktivitas Perusahaan	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Bimtek Penilaian Kinerja Perusahaan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		f. Bimtek Analisis Hasil Pengukuran Produktivitas g. Peraturan - Peraturan Terkait Bidang Produktivitas h. MoU Terkait Bidang Produktivitas	Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP	Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	LP.04.01	2. Promosi dan Kerjasama Produktivitas a. Promosi Produktivitas - Penyusunan NSPK bidang promosi produktivitas - Pemberian Penghargaan Produktivitas dan Kualitas Paramakarya - <i>Technical Expert Service</i> Peningkatan Produktivitas Kerjasama <i>Asian Productivity Organization</i> (APO) - Sidang Tahunan APO (<i>Governing Body Meeting Workshop Meeting of National Productivity Organization Head and Strategic Meeting of APO (LO)</i>) - Publikasi Produktivitas - <i>Demonstration Companies Project (DMP)</i> b. Kerja Sama Produktivitas - Penyusunan NSPK bidang kerja sama produktivitas - <i>Workshop On Productivity Measurement In High Education Sector</i> - <i>Multicountry Observatonal Study Mission On Labour Management Relation</i> - MoU Terkait Bidang Produktivitas	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	LP.04.02	3. Pengembangan dan Penerapan Sistem dan Metode Produktivitas - Penyusunan NSPK Penerapan Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas - Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria Bidang	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kewirausahaan					
		- Penerapan <i>Knowledge Management</i> - Bimbingan Teknis Penerapan <i>Green Productivity</i> - Model Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan Baru Produktif - Bimbingan Teknis Peningkatan Produktivitas - Bimbingan Teknis Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan Bagi LPKS - Pengembangan Pelatihan Masyarakat Produktif Kawasan Terpadu - MoU Terkait Bidang Produktivitas	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	LP.04.03	4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Lembaga Produktivitas					
		a. Bimbingan Peningkatan Kapasitas Aparatur Lembaga Produktivitas	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Operasional Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Pengembangan dan Penguatan Jejaring Lembaga Produktivitas	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pencanangan Produktivitas Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Pelatihan Kader Produktivitas	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas	Biasa	PP	Terbuka		
	LP.05	F. Sertifikasi Profesi					Sekretariat BNSP
	LP.05.00	1. Pengelolaan Sistem Informasi Sertifikasi Serta Publikasi					
		- Penyelenggaraan Website	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pengembangan Pelayanan Berbasis Elektronik	Biasa	PP	Terbuka		
		- Publikasi Berupa Pameran					
		- Pengolahan Data Untuk Bahan Sertifikasi					

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	LP.05.01	2. Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi - Program Subsidi Sertifikasi - Pelayanan Pelatihan dan Sertifikasi Master dan Asesor Kompetensi - Pelayanan <i>Recognition Current Competency (RCC)</i> - Pelayanan Blanko Sertifikat Kompetensi 3. Pemberian lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi - Pengajuan Lisensi Awal - Hasil <i>Full Assessment</i> dan <i>Witness</i> - SK Penetapan Lisensi - Pelatihan Auditor SMM - Pelatihan Asesor Lisensi - Pelatihan Penyusunan Dokumen 4. Pemeliharaan dan Perpanjangan Lisensi - <i>Surveillance</i> - Lisensi Ulang - Penambahan Ruang Lingkup - SK Penetapan Lisensi Ulang	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas Terbatas Terbatas Biasa	PP PP PP PP PP PA PP PP PP PP PA PA PA PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Tertutup Terbuka	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PK	PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA					Ditjen Binapentas naker
	PK.00 PK.00.00	A. Pengembangan Pasar Kerja 1. Analisis Pasar Kerja a. Analisis Kondisi Pasar Kerja di Indonesia - SK Penetapan Tim Pelaksana - Bahan Analisis (Data) - Hasil Analisis Kondisi Pasar Kerja di Indonesia b. Analisis Kondisi Pasar Kerja Luar Negeri - SK Penetapan Tim Pelaksana - Bahan Analisis (Data) - Hasil Analisis Kondisi Pasar Kerja Luar Negeri c. Pengembangan Metode dan Aplikasi Analisis Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana - Bahan Analisis (Data) - Hasil Pengembangan Metode dan Aplikasi Analisis Pasar Kerja d. <i>Training of Trainer</i> Analisis Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana - SK Penetapan Tim Daerah - Data Jumlah Peserta <i>Training of Trainer (TOT)</i> - Pelaksanaan Penyelenggaraan <i>Training of Trainer (TOT)</i> - Laporan Penyelenggaraan <i>Training of Trainer (TOT)</i> e. Bimbingan Teknis Analisis Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana - SK Penetapan Tim Daerah - Data Jumlah Peserta Bimtek Analisis Pasar Kerja	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		Direktorat Pengembangan Pasar Kerja

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK.00.01	- Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimtek Analisis Pasar Kerja - Laporan-Laporan Penyelenggaraan Bimtek Analisis Pasar Kerja 2. Informasi Pasar Kerja a. Kondisi Informasi Pasar Kerja - SK Penetapan Tim Pelaksana - Bahan Analisis (Data) - Hasil Statistik Antar Kerja b. Peningkatan IPK Pemerintah yang Memenuhi Standar ISO 9001:2015 - Proposal-Proposal dari Daerah - Verifikasi Proposal Sesuai Standar - Rekomendasi Hasil Verifikasi - Hasil Verifikasi/Penetapan c. Penyempurnaan dan Pemeliharaan Aplikasi Informasi Pasar Kerja - SK Pelaksana - Laporan Hasil d. Pengembangan Aplikasi Informasi Pasar Kerja - SK Pelaksana IPKOL - Laporan Hasil	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	PK.00.02	3. Analisis Jabatan a. Analisis dan Informasi Jabatan - Pedoman Umum Analisis Jabatan - Modul Analisis Jabatan - SK Penetapan - SK Tim Pelaksana	Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK.00.03	b. Analisis dan Pengembangan - SK Penetapan - SK Penetapan Daerah - Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) - Kamus Jabatan Nasional (KJN) 4. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan a. Standar Pelayanan Penyuluhan Bimbingan Jabatan - SK Penyusunan Standar Pelayanan Penyuluhan Bimbingan Jabatan - Konsinyasi Penyusunan Modul Standar Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan b. Modul Bimbingan Jabatan - SK Modul Bimbingan Jabatan - Konsinyasi Penyusunan Modul Bimbingan Jabatan - FGD Penyusunan Modul Bimbingan Jabatan c. Modul Penyuluhan Jabatan - SK Penyusunan Modul Penyuluhan Jabatan - FGD Modul Penyuluhan Jabatan - <i>Draft</i> Modul Penyuluhan Jabatan	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	PK.01 PK.01.00	B. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 1. Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja a. Penerbitan Surat Izin Usaha (SIU) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Badan Hukum - Surat Keterangan Domisili Perusahaan - NPWP b. Perpanjangan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		Direktorat Penempatan Kerja Dalam Negeri

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Badan Hukum - Surat Keterangan Domisili Perusahaan - NPWP					
		c. Pencabutan Surat Izin Usaha (SIU) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - SIU LPTKS	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Bagi Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) - Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja (AKAD) (Form AKAD-1) - Rancangan Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Kab./Kota Daerah Tujuan AKAD - Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD Dari Dinas Provinsi Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) - Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (Formulir AKAD-1) - Rancangan Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD - Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD dari Dinas Provinsi Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD - Bukti Permintaan Nyata/ <i>Job Order</i> Dari Perusahaan Pemberi Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Bagi Perusahaan Langsung	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK.01.01	- Akta Pendirian - Dokumen Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (Formulir AKAD-1) - Rancangan Perjanjian Kerja yang disahkan oleh Dinas Kab./Kota Daerah tujuan AKAD - Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD Dari Dinas Provinsi Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD 2. Bursa Kerja a. Bursa Kerja Pemerintah - Pameran Kesempatan Kerja (<i>Job Fair</i>) Daerah - Kerangka Acuan Kegiatan <i>Job Fair</i> Daerah - Rencana Pelaksanaan Kegiatan <i>Job Fair</i> Daerah - Petunjuk Teknis Kegiatan <i>Job Fair</i> Daerah - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Pameran Kesempatan Kerja (<i>Job Fair</i>) Nasional - Kerangka Acuan Kegiatan <i>Job Fair</i> Daerah - Rencana Pelaksanaan Kegiatan <i>Job Fair</i> Daerah - Petunjuk Teknis Kegiatan <i>Job Fair</i> Daerah - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Laporan Akhir	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Dokumentasi Kegiatan - Sertifikat Perusahaan Peserta <i>Job Fair</i> Nasional - Pengembangan Ruang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja - Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Ruang - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruang - Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ruang - Dokumen Pengadaan - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pemerintah - Kerangka Acuan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pemerintah - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pemerintah - Petunjuk Teknis Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Kerja Pemerintah - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Draft Peraturan tentang Bursa Kerja Pemerintah - Naskah Peraturan tentang Bursa Kerja Pemerintah - Laporan Akhir	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Dokumentasi Kegiatan - Bantuan Peralatan Bursa Kerja - Kerangka Acuan Kegiatan Bantuan Peralatan Bursa Kerja - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Peralatan Bursa Kerja - Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Peralatan Bursa Kerja - Dokumen Pengadaan - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Pembangunan/Pengembangan Aplikasi e-bursa kerja - Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Dokumen Pengadaan - Modul Aplikasi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pembangunan/Pengembangan Aplikasi e-bursa kerja - Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Dokumen Pengadaan - Modul Aplikasi	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Bursa Kerja Khusus dan Swasta - Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Kerangka Acuan Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Petunjuk Teknis Kegiatan Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus - Administrasi Keuangan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat - Surat - Surat Keputusan - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Sertifikat Peserta - Pameran Kesempatan Kerja (<i>Job Fair</i>) di Bursa Kerja Khusus - Kerangka Acuan Kegiatan di Bursa Kerja Khusus - Rencana Pelaksanaan Kegiatan di Bursa Kerja Khusus - Petunjuk Teknis Kegiatan di Bursa Kerja Khusus - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Proposal dari Daerah - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Kerangka Acuan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Petunjuk Teknis Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Administrasi Keuangan - Surat - Surat - Surat Keputusan - Draft Peraturan tentang Penyusunan Peraturan	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tentang Bursa Khusus dan Swasta					
	PK.01.02	- Naskah Peraturan tentang Penyusunan Peraturan Tentang Bursa Khusus dan Swasta - Laporan Akhir - Dokumentasi Kegiatan - Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (Tembusan dari Disnaker Kab/Kota) - Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 3. Pemberdayaan Pengantar Kerja a. Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja - Dokumen DUPAK beserta data pendukung dari pengantar kerja pusat dan daerah - Dokumen Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja - Dokumen Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Penilai Angka Kredit - Dokumen Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja - Dokumen Kegiatan Penyusunan Peraturan Pengantar Kerja b. Kerjasama Antarlembaga - Dokumen Diklat Pengantar Kerja - Dokumen Kegiatan <i>Workshop</i> Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
			Terbatas	PP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Terbatas	PP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Biasa	PP	Terbuka		
	PK.01.03	4. Penempatan Tenaga Kerja Khusus a. Penempatan Tenaga Kerja Khusus Disabilitas dan Lansia	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK.02 PK.02.00	- Dokumentasi Sosialisasi Hak-Hak Tenaga Kerja Khusus di Tempat Kerja - Data Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas - Penyusunan NSPK tentang Penyandang Disabilitas b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus Wanita dan Muda - <i>Road Map</i> Tenaga Kerja Muda C. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri 1. Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri a. Register dan Peninggal Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) b. Surat Perpanjangan SIP3MI c. Surat Perubahan SIP3MI - Surat Permohonan d. Surat Keputusan Skorsing P3MI - Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi P3MI	Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	PP PP PP PP PA PA PA PA PA	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Pengaduan Keluarga	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Pengaduan LSM	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Pengaduan BNP2TKI	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		e. Surat Keputusan Pencabutan Skorsing SIP3MI	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Klarifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Surat Keputusan Pencabutan SIP3MI	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi SIP3MI	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		g. Surat Menteri untuk Pencairan <i>Bilyet</i> Deposito SIP3MI	Rahasia	PPTM	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		- Surat Permohonan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Keterangan dari BNP2TKI tentang Tidak Adanya Kasus dan Penempatan PMI	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Dokumen Upaya Penyelesaian Kasus	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		h. Surat Menteri untuk Pengembalian <i>Bilyet</i> Deposito SIP3MI	Rahasia	PPTM	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
		i. <i>Bilyet</i> Deposito Jaminan Perlindungan TKI a.n. Menteri q.q. P3MI	Rahasia	PPTM	Tertutup	Dapat Mengganggu Kinerja Kementerian	
	PK.02.01	2. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri					
		a. Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri					
		- Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Penyiapan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Laporan Penempatan PMI yang ke Luar Negeri (AN 05)	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	PK.02.02	d. Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) 3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia a. Pengaduan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/PMI b. Surat Panggilan Klarifikasi P3MI c. Surat Koordinasi Antar Instansi/Kementerian/ Lembaga d. Laporan Penanganan Permasalahan CPMI/PMI e. Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administrasi bagi SIP3MI	Biasa	PP	Terbuka	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Surat Keterangan Bagi CPMI/PMI Tentang Pencairan Klaim Asuransi Yang Ditujukan Kepada BPJS Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Terbatas	PA	Tertutup		
	PK.02.03	g. <i>Brefak</i> dari Perwakilan Republik Indonesia 4. Kerjasama Antar Lembaga a. Kerjasama Lembaga Luar Negeri b. Kerja Sama Lembaga Dalam Negeri c. Dokumen terkait Perjanjian Kerjasama Bilateral - <i>Records of Discussion (RoD)</i> - <i>Summary of Discussion (SoD)</i> - <i>Letter of Intent (LoI)</i>	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup		
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tugas dan Fungsi Kementerian	
	PK.03 PK.03.00	D. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1. Pengembangan Padat Karya a. Padat Karya Infrastruktur - e-Proposal - Proposal Yang Disetujui - Proposal Yang Ditolak - SK Penetapan Lokasi - Perjanjian Kerja Sama - SK Tim Pelaksanaan Daerah - Dokumen Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya Infrastruktur b. Padat Karya Produktif - Proposal Yang Disetujui - Proposal Yang Ditolak - SK Penetapan Lokasi	Biasa Biasa Biasa Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	PP PP PP PA PA PA PP	Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
						Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- Perjanjian Kerja Sama	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- SK Tim Pelaksanaan Daerah	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya Produktif	Terbatas	PP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Pedoman Umum Padat Karya	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis Padat Karya	Biasa	PP	Terbuka		
	PK.03.01	2. Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna					
		a. Sektor Pertanian dan Maritim					
		- Proposal Yang Disetujui	Biasa	PP	Terbuka		
		- Proposal Yang Ditolak	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK Penetapan Lokasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Perjanjian Kerja Sama	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- SK Tim Pelaksanaan Daerah	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		b. Sektor Jasa dan Industri Kreatif - Proposal Yang Disetujui - Proposal Yang Ditolak - SK Penetapan Lokasi - MoU/Perjanjian Kerja Sama - SK Tim Pelaksanaan Daerah - Wirausaha Menggunakan Teknologi Sederhana - Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis TTG	Biasa Biasa Terbatas	PP PP PA	Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	PK.03.02	3. Pendampingan dan Kerja Sama Antar Lembaga a. Pendampingan - Pedoman dan Juklak TKS - Dokumen Rekrutmen dan Seleksi TKS Sebagai Pendamping - Pembekalan TKS Sebagai Pendamping Wirausaha	Biasa Terbatas Biasa	PP PP PP	Terbuka Tertutup Terbuka	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SK Penetapan Lokasi dan Peserta Sebagai Pendamping	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- TKS Pendampingan Wirausaha Mandiri	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Kerja sama Antar Lembaga					
		- MoU Kerja sama Kelembagaan dan Jejaring Kemitraan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Paripurna Kegiatan TKS Sebagai Pendamping	Biasa	PP	Terbuka		
	PK.03.03	4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri					
		a. Tenaga Kerja Mandiri					
		- MoU Kontrak Kerja Pemberdayaan TKM	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penentuan Lokasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- SK Usulan Tim Pelaksana Daerah	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- SK Direktur tentang Tim Pelaksana	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Dokumen Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Wirausaha	Terbatas	PP	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis TKM - Laporan Paripurna dari Dinas urusan Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Paripurna dari Dinas urusan Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja Mandiri					
		- SK Pembuatan Pedoman	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	PK.04	E. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing					
	PK.04.00	1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)					
		a. Daftar Perusahaan Pemberi Kerja	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		b. Penerbitan RPTKA Baru					
		- Data Pengurus Perusahaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- SK Tentang Pengesahan RPTKA Menurut Jabatan, Jumlah, dan Jangka Waktu	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		c. Penerbitan RPTKA Darurat	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		d. Penerbitan RPTKA Sementara	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
	PK.04.01	e. Penerbitan RPTKA Perubahan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		2. Notifikasi					
		a. Penerbitan Notifikasi					
		- Data Pengurus Perusahaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Jangka Waktu Notifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		b. Penerbitan Perpanjangan Notifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		c. Permohonan Pencabutan Notifikasi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		d. Permohonan Notifikasi Non-DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing), Non-RPTKA	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		e. Permohonan Penarikan DKPTKA	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		f. Permohonan Alih Jabatan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		g. Permohonan Alih Sponsor	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
4	HI	HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA					Ditjen PHI dan Jamsos
	HI.00 HI.00.00	A. Persyaratan Kerja 1. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama a. Pengesahan Peraturan Perusahaan - Berkas Pengesahan PP - Laporan Rekapitulasi Pengesahan PP - Laporan Bimbingan Penyusunan PP - Laporan <i>Trainer</i> Yang Telah Dilatih Menyusun PP b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Berkas Pengesahan PKB - Laporan Rekapitulasi Pendaftaran PKB - Laporan Bimbingan Pembuatan PKB - Laporan <i>Trainer</i> Yang Telah Dilatih Menyusun PKB	Terbatas Biasa Biasa Biasa Terbatas Biasa Biasa Biasa	PA PA PP PP PA PA PP PP	Tertutup Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Terbuka Terbuka Terbuka	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	Direktorat Persyaratan Kerja
	HI.00.01	2. Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh a. Laporan Dialog Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Buruh					
	HI.00.02	b. Laporan Posko THR dan Mudik Lebaran	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Laporan Tentang Koperasi Pekerja	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Bantuan Sosial Koperasi Pekerja	Biasa	PP	Terbuka		
	HI.00.03	3. Kesetaraan Syarat Kerja					
		a. Laporan Advokasi <i>Task Force</i> EEO di Daerah	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Laporan Pencetakan Panduan Umum EEO	Biasa	PP	Terbuka		
	HI.01	4. Hubungan Kerja					
	HI.01.00	a. Laporan Dialog Pelaksanaan Hubungan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Laporan Penyusunan NSPK Hubungan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		c. SKKNI Bidang Syarat Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Data <i>Outsourcing</i> (perusahaan yang bermasalah dan yang telah terselesaikan)	Biasa	PP	Terbuka		
		B. Pengupahan					Direktorat Pengupahan
		1. Standardisasi Pengupahan					
		a. Standardisasi Pengupahan					
		- Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pengupahan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		- Surat Edaran Menteri tentang Penetapan Upah Minimum	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK UMP dari Seluruh Indonesia	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pengaduan dan Konsultasi Pengupahan dari Serikat Pekerja, Perusahaan, dan Individu	Biasa	PP	Terbuka		
		- Struktur dan Skala Upah	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Fasilitasi Pengupahan					
		- SK Presiden tentang Penetapan Anggota Dewan Pengupahan Nasional	Biasa	PP	Terbuka		
		- Hasil Kajian Dewan Pengupahan Nasional	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	HI.01.01	2. Pengembangan Pengupahan - Rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional - Laporan Tahunan Dewan Pengupahan Nasional - Laporan Paripurna Dewan Pengupahan Nasional - Data dan Informasi Pengupahan - Hasil Kajian Pengupahan - Sosialisasi Peraturan Tentang Pengupahan	Biasa	PP	Terbuka		Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	HI.02	C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
	HI.02.00	1. Pembinaan Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga a. Program, Iuran dan Manfaat Jaminan Sosial - Konsultasi dan Koordinasi Bidang Jaminan Sosial b. Pengembangan dan Evaluasi Kerja Sama Antar Lembaga c. Profil Potensi Kelompok Sasaran - Draft Usulan - Bahan Kelengkapan Draft	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
	HI.02.01	2. Kepesertaan Jaminan Sosial a. Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam dan Luar Hubungan Kerja b. Analisis dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial c. Penyusunan Bahan Kebijakan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
	HI.03	D. Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	Biasa	PP	Terbuka		Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial
	HI.03.00	1. Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha a. Laporan Dialog antar P/B dan SP/SB b. Laporan Dialog Sosial antar Organisasi Pengusaha c. Laporan <i>May Day</i> d. Laporan Pencatatan dan Verifikasi SP/SB	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
	HI.03.01	2. Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	HI.03.02	a. Pokok-Pokok Pikiran LKS Tripartit Nasional b. Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Nasional c. Laporan Dialog Sosial LKS Tripartit d. Laporan Dialog Sosial LKS Bipartit e. Laporan Tahunan LKS Tripartit Nasional	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	HI.04	3. Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial					
	HI.04.00	a. TOT Bernegosiasi bagi Pelaku HI b. Laporan Pemahaman HI bagi dunia pendidikan	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
		E. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial					
		a. Deteksi Dini					
		- Berkas Hasil Penilaian Hubungan Industrial di Perusahaan (Termasuk di dalamnya mulai dari perencanaan, Pedoman Kerja, SK Tim, Pelaksanaan, Laporan dan Hasil)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Konsultasi dan Koordinasi	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Penanganan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan					
		- Data Mogok Kerja Per Sektor Usaha dari Seluruh Provinsi (termasuk di dalamnya Nama Perusahaan, Daerah, Penyebab, Penanganan, Jam Kerja Hilang, Tenaga Kerja terlibat,dll.)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Data Mogok Kerja/Unjuk Rasa yang Datang ke Kementerian (termasuk di dalamnya Jumlah Peserta, Unsur, Penyebab, Penanganannya.)	Biasa	PP	Terbuka		
	HI.04.01	2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		a. Pemberdayaan Penyelesaian Secara Bipartit					
		- Data Pemutusan Hubungan Kerja Per Sektor Usaha Dari Seluruh Provinsi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Data Penyelesaian Perselisihan dengan Persetujuan/	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perjanjian Bersama Pusat dan Daerah					
		- Dokumentasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial:	Biasa	PP	Terbuka		
		- Kasus - kasus tertentu yang besar	Biasa	PP	Terbuka		
		- Kasus - kasus yang lama penanganannya	Biasa	PP	Terbuka		
		- Kasus - kasus Multinasional atau berpotensi konflik	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Pemberdayaan Penyelesaian Secara Mediasi					
		- Data Penyelesaian Perselisihan dengan Anjuran, baik Pusat maupun Daerah	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pembaruan Laporan Penanganan Perselisihan/Kasus yang Sedang Berjalan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Hasil Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (Laporan ke Presiden, Menteri, DPR, dll.)	Biasa	PP	Terbuka		
	HI.04.02	3. Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		a. Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
		- Dokumen Struktur Kepengurusan dan Program Kerja Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Kegiatan AMHI	Biasa	PP	Terbuka		
		- Data Mediator yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan/Rekomendasi/Hasil Diseminasi dan atau Forum Mediator/Konsiliator/Arbiter	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Jabatan Fungsional Mediator					
		- Data Mediator Terbaru per Bulan dari Pusat dan Daerah	Biasa	PP	Terbuka		
		- Dokumen Permohonan Pengesahan/Legitimasi Mediator	Biasa	PP	Terbuka		
		- Dokumen SK Legitimasi Mediator	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
5	AS	PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA					Ditjen Binwasnaker dan K3
	AS.00 AS.00.00	A. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1. Penyiapan Perumusan Kebijakan a. Penyusunan Buku Pedoman b. Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) di Jabodetabek dan Daerah c. Penanganan Aksi <i>Mayday</i> di Jabodetabek dan Daerah d. Gelar Kasus Norma Ketenagakerjaan e. Audiensi f. Notulen	Biasa Biasa Terbatas Terbatas Biasa Terbatas	PP PP PA PA PP PA	Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	AS.00.01	2. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan a. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat - Pengaduan - Asistensi	 Terbatas Terbatas	 PA PA	 Tertutup Tertutup	 Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		b. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pengupahan					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penetapan Upah Lembur	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		c. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) - Panggilan Dinas - Laporan Hasil Pemeriksaan - Nota Pemeriksaan - Tanggapan dari Perusahaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		d. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Tanggapan dari Perusahaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		e. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Hubungan Kerja					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		g. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kompensasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penetapan Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		h. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kepesertaan dan Kerjasama Antar Lembaga Badan Penjamin Sosial Tenaga Kerja					
		- Pengaduan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Asistensi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan) - Surat Perintah (Koordinasi Kasus) - Panggilan Dinas - Laporan Hasil Pemeriksaan - Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
AS.00.02		3. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria					
		a. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat					
		- Nota Dinas (Sanksi Administratif)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		b. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pengupahan					

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Rekomendasi Pembekuan Sementara Perizinan pada instansi terkait (Sanksi Administratif)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		c. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Nota Dinas (Kunci PTA/Deportasi)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		d. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri - Nota Dinas (Skorsing)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Dinas (Pencabutan Izin PPTKIS)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		e. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Hubungan Kerja - Nota Dinas (Sanksi Administratif)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kementerian	
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat					
		- Nota Dinas (Sanksi Administratif)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		g. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kompensasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
		- Nota Dinas (Sanksi Administratif)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		h. Penanganan Kasus Pengawasan Norma Kepesertaan dan Kerjasama Antar Lembaga Badan Penjamin Sosial Tenaga Kerja					
		- Nota Dinas (Sanksi Administratif)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Laporan Kejadian (Sanksi Pidana)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	AS.00.03	4. Bimbingan Teknis dan Supervisi					
		a. Sosialisasi	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Bimbingan Teknis	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Temu Teknis	Biasa	PP	Terbuka		
	AS.00.04	5. Evaluasi dan Pelaporan					
		- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek	Biasa	PP	Terbuka		
	AS.01	B. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak					
	AS.01.00	1. Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan					
		a. Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian Norma Fungsi Reproduksi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Asistensi ke Dinas Provinsi					
		- Surat Perintah Supervisi Pemeriksaan					
		- Laporan Hasil Pemeriksaan					
		b. Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian Norma Kerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari	Biasa	PP	Terbuka		
		- Asistensi ke Dinas Provinsi					
		- Surat Perintah Supervisi/Pemeriksaan					
		- Laporan Hasil Pemeriksaan					
		c. FGD Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK Pelaksanaan Kegiatan					
		- Surat Perintah					
		- Data Jumlah Peserta FGD					
		- Laporan Penyelenggaraan FGD					

Direktorat
Pengawasan
Norma Kerja
Perempuan dan
Anak

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. FGD Perlindungan Norma Kerja Perempuan dalam Rangka <i>Putting Out System</i> - SK Pelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD e. <i>Workshop</i> Pengawasan Norma Perlindungan Perempuan pada Fungsi Reproduksi - SK Penetapan Tim Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta <i>Workshop</i> - Laporan Penyelenggaraan <i>Workshop</i> f. <i>Workshop</i> Pengawasan Norma Perlindungan Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari - SK Pelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta <i>Workshop</i> - Laporan Penyelenggaraan <i>Workshop</i> g. Temu Teknis Pengawasan Norma Fungsi Reproduksi Perlindungan Norma Kerja Perempuan - SK Pelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Temu Teknis - Laporan Penyelenggaraan Temu Teknis h. Temu Teknis Pengawasan Norma Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari - SK Pelaksanaan Kegiatan - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Temu Teknis	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	AS.01.01	- Laporan Penyelenggaraan Temu Teknis 2. Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan a. Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja 1. Sosialisasi Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Pengupahan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Sosialisasi - Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi 2. FGD Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD 3. Temu Teknis/Sosialisasi Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Pekerjaan dan Jabatan - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Temu Teknis - Laporan Penyelenggaraan Temu Teknis 4. Kampanye Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan - SK Pelaksana - Surat Perintah	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	AS.01.02	- Data Jumlah Peserta Kampanye - Laporan Penyelenggaraan Kampanye 5. Studi Komparasi Penghapusan Diskriminasi di Tempat Kerja - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Studi Komparasi - Laporan Penyelenggaraan Studi Komparasi 3. Pengawasan Norma Pelindungan Pekerja Anak a. Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian/Asistensi/Koordinasi Dalam Rangka Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak Dalam Bakat dan Minat - Asistensi ke Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/Pemeriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan b. Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian/Asistensi/Koordinasi Dalam Rangka Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak Dalam Pekerjaan Ringan dan Pelatihan Kerja - Asistensi ke Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/Pemeriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan c. FGD pengawasan Norma Kerja Anak Dalam Mengembangkan Bakat dan Minat - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD d. Kampanye Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional - SK Pelaksana	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	AS.01.03	- Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Kampanye - Laporan Penyelenggaraan Kampanye e. Pencanaan Indonesia Bebas Pekerja Anak - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta Pencanaan - Laporan Penyelenggaraan Pencanaan f. FGD tentang Pengawasan Norma Kerja Anak Dalam Pekerjaan Ringan dan Latihan Kerja - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD 4. Pengawasan Norma Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak a. Supervisi/Pemeriksaan/Pengujian/Asistensi/Koordinasi Dalam Rangka Penerapan Norma BPTA di 12 Wilayah - Surat Pemberitahuan di Dinas Provinsi - Surat Perintah Supervisi/Pemeriksaan/Koordinasi - Laporan Hasil Kegiatan b. <i>Workshop</i> Pengawasan Norma BPTA - SK Penetapan Tim Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta <i>Workshop</i> - Laporan Penyelenggaraan <i>Workshop</i> c. Promosi Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	AS.01.04	- SK Penetapan Tim Pelaksana - Surat Perintah - Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi - Laporan Penyelenggaraan Promosi d. FGD Pengawasan Norma PBTA - SK Pelaksana - Surat Perintah - Data Jumlah Peserta FGD - Laporan Penyelenggaraan FGD e. Penyusunan <i>Draft</i> Revisi Kepmenaker No.235/ MEN.VII/2003/PN-BPTA - SK Penyusunan - Data Peserta Penyusun - Surat Perintah - Laporan Penyusunan <i>Draft</i> Revisi 5. Penarikan Pekerja Anak Dari Bentuk Pekerjaan Teburuk Anak (PPA-PKH) a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPA-PKH - Surat Tugas - Laporan Pelatihan b. Pendampingan Pekerja Anak di 233 <i>Shelter</i> Pada 54 Kab/Kota - SK Menteri - SK Target Penerima Manfaat PPA-PKH - SK Tim Pelaksana Pusat - SK Tim Pelaksana Provinsi dan UPTD/KORWIL/Satwasker - SK Pendamping	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SK Anak Penerima Manfaat PPA-PKH - Data Anak dan Pendamping - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Pendampingan					
		c. Monitoring dan Evaluasi Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca <i>Shelter</i> - Surat Perintah Tugas - Laporan Monev	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Pemutahiran Data Anak - Surat Tugas - Data Anak - Pelaporan	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Lokakarya Peran Serta LSM Dalam Rangka Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 - SK Pelaksana - Data Jumlah Peserta Lokakarya - Laporan Penyelenggaraan Lokakarya	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Penyusunan Pedoman PPA-PKH - SK Pelaksana - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Pedoman - Buku Pedoman PPA-PKH	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Penyusunan/Perencanaan Program Kegiatan PPA-PKH Pusat - SK Pelaksana - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Penyusunan/Perencanaan Program Kegiatan PPA-PKH Pusat dan Provinsi	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- SK Pelaksana pusat dan daerah - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program					
		i. Konsinyasi Penyusunan RKA-KL - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan Konsinyasi - RKA-KL j. Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPA-PKH di 2 Provinsi - SK Pelaksana Pusat dan Daerah - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan dan Hasil Rapat k. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengembalian Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan di 7 Provinsi - Surat Perintah - Laporan Pelaksanaan dan Hasil Rapat - SK Pelaksana Pusat dan Daerah l. Lokakarya Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan PPA_PKH - SK Pelaksana - Data Jumlah Peserta Lokakarya - Laporan Penyelenggaraan Lokakarya	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
	AS.02 AS.02.00	C. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan a. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan b. Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		i. Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
		j. Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Mekanik serta Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	Biasa	PP	Terbuka		
	AS.02.01	2. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran					
		a. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		f. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		h. Bahan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		i. Bahan Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		j. Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
	AS.02.02	3. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja					
		a. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		d. Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		

[illegible]

[illegible]

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		D. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
	AS.03	E. Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan					
	AS.03.00	1. Penyiapan Perumusan Kebijakan					
		a. Kebijakan Tata Laksana Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Supervisi Kader Norma Ketenagakerjaan	Biasa	PA	Terbuka		
		d. Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	PA	Tertutup		
		e. Gelar Kasus Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Audiensi	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Notulen	Biasa	PP	Terbuka		
	AS.03.01	2. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan					
		a. Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Jabatan Fungsional					
		- Usulan Penerbitan SK Pengawas Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Usulan Penerbitan SKEP PPNS	Biasa	PP	Terbuka		
		- Usulan Penilaian Angka Kredit	Biasa	PP	Terbuka		
		- Verifikasi dan Validasi Data Pengawas Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Verifikasi dan Validasi Data PPNS Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		b. Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Tata Laksana - Penyiapan bahan dan data - Analisa/Penelahaan Rencana Penyusunan, Prosedur Kerja, Metode Kerja dan Rancangan Peraturan/Kebijakan - Pelaksanaan Koordinasi	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
		c. Supervisi di bidang Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan - Nota Dinas - Laporan Kelembagaan	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
		d. Supervisi di bidang Sarana dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan - Surat Permohonan Pelaksana - Jadwal - Surat Perintah (Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan)	Biasa Biasa Biasa	PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka		
		e. Penanganan Kasus di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan - Laporan Kejadian	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Gelar Kasus	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah Tugas	Biasa	PA	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Perintah Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Panggilan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- BAP Saksi-saksi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Hasil BAP	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Resume Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Penanganan Kasus di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
		- Laporan Kejadian	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Gelar Kasus	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah Tugas	Biasa	PA	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Perintah Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah di Mulainya Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Gelar Perkara Awal	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Panggilan Saksi-Saksi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- BAP Saksi-Saksi	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Gelar Perkara	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Resume Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		g. Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan					
		- Pengaduan/Pengaduan Masyarakat	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Kajian Kasus	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus) - Panggilan Dinas	Biasa Terbatas	PP PA	Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penetapan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		h. Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Pengaduan - Laporan Masyarakat - Kajian Kasus	Biasa Biasa Terbatas	PP PA PA	Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Surat Perintah (Koordinasi Kasus)	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Panggilan Dinas	Biasa	PP	Terbuka		
		- Laporan Hasil Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Nota Pemeriksaan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Penetapan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	AS.03.02	3. Penyiapan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria					
		a. Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Jabatan Fungsional					
		- Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		- SK Penunjukan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		- SKEP PPNS Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pedoman/Juklak/Juknis	Biasa	PP	Terbuka		
		- Atensi	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Penyiapan Bahan Perumusan di Bidang Tata Laksana					
		- Nota Dinas	Biasa	PP	Terbuka		
		- Atensi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pedoman/Juklak/Juknis	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Supervisi di Bidang Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan - Berita Acara Pelaksanaan - Evaluasi Peserta dan Narasumber - Daftar Hadir Peserta dan Narasumber - Kelengkapan Berkas Peserta - Sertifikat	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
		d. Supervisi di Bidang Sarana dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan - Nota Dinas (Provinsi) - Pendataan Kebutuhan, Sarana dan Prasarana Daerah	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		
		e. Penanganan Kasus di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan - Laporan Hasil Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Berkas Perkara P21/SP3	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		f. Penanganan Kasus di Bidang Penyidikan Tindak Pidana Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Laporan Hasil Penyidikan	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		- Berkas Perkara P21/SP3	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		g. Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan - Laporan Hasil Pemeriksaan - Nota Pemeriksaan	Terbatas Terbatas	PA PA	Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		h. Tindak Lanjut di Bidang Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Laporan Hasil Pemeriksaan - Nota Pemeriksaan	Terbatas Terbatas	PA PA	Tertutup Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
	AS.03.03	4. Bimbingan Teknis dan Supervisi a. Sosialisasi b. Bimbingan Teknis c. Bantuan Teknis d. <i>Focus Group Discussion</i>	Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		
	AS.03.04	5. Evaluasi dan Pelaporan a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	AS.04 AS.04.00	F. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. Sarana dan Fasilitas K3 a. Pedoman Promotif dan Preventif Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja b. Draft Profil K3 Nasional c. Penyempurnaan Bahan Komunikasi/Informasi/Edukasi - Bahan Edukasi Bimbingan Kalibrasi Pompa - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Sulfur Dioksida di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Pengujian Gas Beracun dengan Infrared - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Pencahayaannya di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Medan Magnet Radio Frekuensi di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Medan Magnet Subradio Frekuensi di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Getaran Lengan Tangan di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Getaran Seluruh Tubuh di Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengukuran Debu Total di Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengukuran Debu Respirabel di Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Abses di Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Silika di Udara Tempat Kerja - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Kebisingan di Tempat Kerja	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka		Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
	AS.04.01	- Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pengujian Gas di Ruang Terbatas - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pemeriksaan Spirometri - Bahan Edukasi Bimbingan Metode Pemeriksaan Audiometri - Bahan Edukasi Bimbingan Manajemen K3 Laboratorium - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 untuk Bekerja di Ketinggian - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 di Ruang Terbatas - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 di Sektor Minyak dan Gas Bumi - Bahan Komunikasi dan Promosi di Sektor Perkebunan - Bahan Komunikasi dan Promosi K3 Keselamatan Berkendara - Bahan Komunikasi K3 di Sektor Pertambangan d. Penyempurnaan Bahan Komunikasi/Informasi/Edukasi 2. Pengkajian dan Standardisasi K3 a. Kajian Kondisi/Perilaku di Sektor UMKM b. Pemeriksaan/Pengujian Norma Ketenagakerjaan - Pelayanan Laboratorium Berupa Pemeriksaan, Pengujian dan Analisis Faktor Fisika dan Kimia c. Peningkatan Kesehatan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan Indonesia	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa Terbatas	PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PA	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pemeriksaan Awal - Pemeriksaan Khusus - Analisis	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
			Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		d. Pengembangan Kompetensi K3	Biasa	PP	Terbuka		
		e. Penyusunan Draft/Konsep RSNI Bidang K3					
		- Penyusunan - Pembahasan - Prakonvensi - Konvensi	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		
		f. Dokumentasi Pertemuan dan Koordinasi Komite Teknis 13-01	Biasa	PP	Terbuka		
		g. Survey Uji Banding Laboratorium Pengujian K3	Terbatas	PA	Tertutup	Dapat Mengganggu Tugas dan Fungsi Kementerian	
		h. Bimbingan Teknis K3 Bagi Tenaga Teknis K3	Biasa	PP	Terbuka		
	AS.04.02	3. Pengembangan SDM K3					
		a. Pelatihan Teknis untuk <i>Stakeholder</i> /Masyarakat					
		- Pengelolaan Pelatihan K3 - Pengelolaan Sertifikasi Pembinaan Pelatihan K3	Biasa	PP	Terbuka		
			Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pengelolaan Pelatihan Kompetensi K3 Bagi Instruktur BLK	Biasa	PP	Terbuka		
		b. Penyusunan RSKKNI K3 Ketenagalistrikan					
		- Penyusunan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Pembahasan	Biasa	PP	Terbuka		
		- Prakonvensi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Konvensi	Biasa	PP	Terbuka		
		c. Pembinaan/Pengembangan Kompetensi SDM K3					
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kelistrikan di Tempat Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 di Ruang Terbatas	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 di Perkantoran	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Bekerja di Ketinggian	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 di Konstruksi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pengelolaan Makanan dan Gizi Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pengendalian HIV di Tempat Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Penyakit Akibat Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kelelahan dan Penyalahgunaan Alkohol di Tempat Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Ergonomi	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Higiene Industri	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kecelakaan Kerja	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Kebakaran	Biasa	PP	Terbuka		
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Pengoperasian Kendaraan Alat Berat	Biasa	PP	Terbuka		

No.	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Bahan Edukasi Bimbingan K3 Perbengkelan - Pelatihan Dokter	Biasa Biasa	PP PP	Terbuka Terbuka		

Keterangan:

- PPTM = Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
PPTP = Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
PA = Pejabat Administrator
PP = Pejabat Pengawas

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001